

Pendidikan Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang

Firza^{1*}, Elfa Michellia Karima¹, Annisa Annida Nasution¹, Erza Abianza¹ and Rut Damayanti Gultom¹

¹Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

firzaa@fis.unp.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis pendidikan perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan studi literatur atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Informasi tersebut dianalisis dan disusun untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada masa pendudukan Jepang, pemerintah memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan kesetaraan gender sehingga para perempuan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Perempuan Indonesia juga turut aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi perempuan pada badan resmi Jepang pada masa ini. Pemerintahan Jepang membuka sekolah kependidikan putri Wakaba yang bertujuan untuk membentuk para wanita menjadi ibu rumah tangga yang baik, sejalan dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah Jepang.

Kata Kunci : Pendudukan Jepang, Pendidikan, Perempuan

Pendahuluan

Ketika Jepang menguasai Indonesia selama tiga setengah tahun (1942-1945), ini menandai hal baru bagi sejarah bangsa Indonesia. Periode pendudukan Jepang ini menampilkan perbedaan yang mencolok dibanding masa kekuasaan Belanda, terutama dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami transformasi yang mencolok, memperkenalkan struktur pendidikan yang lebih sederhana namun merata, yang masih berpengaruh hingga saat ini. Di masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan yang lebih terstruktur, seperti Sekolah Rakyat sebagai tingkat dasar pendidikan, yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan berlangsung selama enam tahun. Kemudian, terdapat Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko) sebagai tingkat lanjutan dari Sekolah Rakyat, dengan durasi tiga tahun. Terakhir, ada Sekolah Menengah Tinggi (SMT) yang berfungsi sebagai tingkat lanjutan umum, bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi, juga berlangsung selama tiga tahun. Selain itu, berbagai institusi pendidikan lainnya seperti sekolah kejuruan, sekolah guru, dan perguruan tinggi juga tetap beroperasi pada masa itu.

Meskipun pendidikan yang diberikan oleh pendudukan Jepang memiliki tujuan utama untuk mendukung perang di Asia Timur Raya dan mempersiapkan generasi muda Indonesia

untuk berkontribusi dalam perang, pendudukan tersebut juga membawa beberapa keuntungan bagi bidang pendidikan. Misalnya, perkembangan bahasa Indonesia yang semakin luas, terjemahan buku pelajaran dari bahasa asing (Belanda) ke bahasa Indonesia, serta pengenalan seni bela diri dan perang kepada pemuda-pemuda Indonesia. Yang lebih penting lagi, pendudukan Jepang juga menghilangkan pemetaan atau pengkotakan dalam merasakan pendidikan di Indonesia, sehingga diskriminasi berdasarkan golongan, keturunan, atau agama tidak lagi ada, memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan bagi perempuan pada masa pendudukan Jepang juga mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun pada awalnya terdapat harapan besar terhadap pemerintah Jepang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan kesetaraan gender yang lebih besar, namun realitanya, pendidikan perempuan masih diarahkan untuk mendukung agenda perang Jepang. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek positif dalam pendidikan perempuan pada masa itu. Salah satunya adalah penghapusan pembatasan-pembatasan dalam akses pendidikan yang sebelumnya mungkin dialami oleh perempuan, seperti penghapusan diskriminasi berdasarkan golongan sosial atau status keturunan. Hal ini membuka pintu bagi perempuan dari berbagai latar belakang untuk meraih pendidikan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, perkembangan bahasa Indonesia dan terjemahan buku pelajaran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia juga membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Dari data di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah bahwa perempuan pada masa pendudukan Jepang dapat merasakan peningkatan akses terhadap pendidikan yang sebelumnya kurang didapat. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang mengarah pada pertanyaan bagaimana pendidikan perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendidikan perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999 dalam Hartanto et al, 2020: 2). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi literatur untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti. Studi literatur merupakan teknik yang berguna untuk menemukan ide-ide baru, memperdalam pemahaman tentang topik, dan memperoleh informasi yang relevan dari penelitian terdahulu. Dalam melakukan studi literatur, penulis mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Kemudian, informasi tersebut dianalisis dan disusun untuk menarik kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, hasil dari pengumpulan beberapa

penelitian terdahulu digunakan untuk menyimpulkan bagaimana pendidikan perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pendudukan Jepang di Indonesia

Jepang menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun (1942-1945) yang menjadi babak baru dalam periode sejarah bangsa Indonesia. Meskipun singkat, namun menimbulkan bekas yang mendalam di kalangan masyarakat secara umum. Masa tiga setengah tahun yang sering disebut “seumur jagung” itu, merupakan masa krusial dari sisi politik, di mana para pemimpin Indonesia dipaksa untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat sekaligus hati-hati, karena situasi Indonesia dan dunia internasional sedang terlibat dalam panasnya Perang Dunia ke II. Masa pemerintahan Jepang ini merupakan masa pemerintahan yang singkat jika dibanding dengan pemerintahan sebelumnya (Belanda). Artinya rakyat Indonesia dulu mempunyai harapan besar terhadap pemerintahan Jepang untuk menentukan perjuangan bangsa Indonesia, sebab rakyat Indonesia telah lama menginginkan kemerdekaan, sehingga simpati kepada Jepang disambut dengan baik atas kedatangannya (Notosusanto, 1979: 41).

Kedatangan Jepang ke Indonesia awalnya disambut hangat dengan baik oleh rakyat Indonesia. Pada akhirnya Sambutan tersebut segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui tujuan Jepang datang ke Indonesia tidak lebih baik dari Belanda. Kenyataannya Jepang justru bertindak kejam, brutal, dan tidak segan-segan menghukum rakyat Indonesia yang dianggapnya membangkang dan melawan (Aprilia, Sugiyanto, dan Handayani, 2017: 261). Di sisi lain, zaman pendudukan Jepang juga diingat oleh masyarakat Indonesia pada khususnya sebagai zaman yang penuh kekejaman. Ingatan itu muncul akibat adanya kebijakan eksploitasi seperti *romusha* dan wajib serah padi yang dinilai menyengsarakan.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tentu berbeda dengan masa kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Demi menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang pada mulanya memberlakukan sistem pendidikan yang cukup baik. Akses pendidikan sedikit lebih mudah untuk didapatkan, tidak ada pembedaan atau diskriminasi dalam pendidikan untuk kaum pria maupun perempuan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan. Pada masa Belanda, yang dapat merasakan pendidikan formal hanya rakyat pribumi untuk kalangan menengah ke atas, sementara rakyat kecil tidak bisa memiliki kesempatan. Sehingga pada masa Jepang mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Pada masa pendudukan Jepang, sistem kurikulum dualisme juga dihapuskan. Lembaga pendidikan yang didirikan pada masa Pemerintah kolonial Belanda dihapuskan oleh Jepang. Sistem dualisme (pengajaran Barat) maupun pengajaran bumi putera tidak lagi diberlakukan. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu

Sekolah Rakyat atau *kokimin gakkoo* begitu juga Sekolah Desa masih tetap digunakan namun dengan nama Sekolah Pertama.

Pada masa pendudukan Jepang pendidikan dibagi akan berbagai tingkatan yang lebih ringkas dan masih digunakan hingga saat ini seperti; Sekolah Rakyat yang menjadi sekolah dasar pada masa pendudukan Jepang. Sekolah ini dibuka untuk umum dan semua golongan penduduk. Sekolah ini berlangsung selama 6 tahun. Selanjutnya, ada Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*) yang menjadi sekolah lanjutan dari sekolah dasar atau sekolah rakyat tadi. Lama pendidikannya berlangsung selama 3 tahun. Dan terakhir ada Sekolah Menengah Tinggi (SMT) yang juga disebut sekolah lanjutan umum tingkat atas, sekolah ini ditujukan untuk menyiapkan para pelajar untuk melanjutkan sekolah tinggi. Lama pendidikannya juga tiga tahun. Selain ketiga sekolah tadi juga masih ada sekolah lain seperti sekolah kejuruan, sekolah guru dan perguruan tinggi. Namun, pendidikan yang diberikan oleh pendudukan Jepang hanya bertujuan untuk membantu mereka dalam kegiatan Perang Asia Timur Raya saja atau hanya mempersiapkan generasi muda bangsa Indonesia saat itu agar siap berkontribusi dalam kegiatan perang.

Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan militer. Karena sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Sehingga siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan. Selanjutnya, Jepang juga melakukan kebijakan berupa penerapan kebudayaan *Seikerei*. Budaya *Seikerei* merupakan cara penghormatan dengan membungkukkan badan 90 derajat kepada Kaisar Jepang, Tenno Heika yang dipercayai oleh masyarakat Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari. Hal ini dilakukan setiap akan memulai pembelajaran. (Ramdhani, S. 2021). Penghormatan ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*Kimigayo*). Jadi, tidak semua rakyat Indonesia menerima kebiasaan akan hal ini terutama dari kalangan umat Islam. Sehingga penerapan *Seikerei* ini ditentang oleh kalangan umat Islam, salah satunya perlawanan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Zainal Mustafa pengasuh Pesantren Sukamanah, Jawa Barat. Meskipun demikian, pendudukan Jepang di Indonesia membawa keuntungan tersendiri bagi bidang pendidikan, seperti bahasa Indonesia yang mulai berkembang secara luas, buku-buku pelajaran yang awalnya dalam bahasa asing (Belanda) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, lalu diperkenalkannya seni bela diri dan perang kepada para pemuda-pemuda, dan yang paling utama hilangnya pemetaan atau pengkotakan dalam merasakan pendidikan di Indonesia. Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, bahkan agama sudah tidak ada lagi sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan dalam merasakan bangku sekolah.

Namun pada kegiatan badan resmi Jepang masa pendudukan Jepang wanita tidak banyak memperoleh kesempatan karena setiap gerak selalu mendapat pengawasan yang ketat dari kempetai Jepang. Akan tetapi dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Jepang semua anak diberikan kesempatan untuk belajar termasuk untuk pendidikan perempuan. Meskipun pendidikan untuk perempuan diizinkan, akan tetapi kesempatan dalam mengenyam pendidikan tidak setinggi para kaum laki-laki pendidikan untuk mereka juga selalu dalam

pengawasan pemerintahan Jepang. Karena, fokusnya pendidikan saat itu untuk menunjang kebutuhan perang Jepang

Aktivitas Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang

Dalam perspektif biologis, perbedaan antara perempuan dan laki-laki menjadi nyata, namun dalam konteks sosial, keduanya dipandang sebagai entitas yang saling melengkapi, dilengkapi dengan kemampuan akal dan pemikiran yang sama-sama berharga. Adanya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki menjadi sebuah prinsip yang mendasari nilai-nilai sosial yang adil dan merata. Namun, ironisnya, di tengah upaya untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, perempuan sering kali menjadi korban ketidakadilan dan kesulitan dalam mengakses hak-haknya yang seharusnya sama dengan laki-laki. Di Indonesia, gerakan emansipasi perempuan telah menjadi bagian dari sejarah, yang didorong oleh pemikiran seorang tokoh perempuan terkenal, Kartini. Visinya mengarah pada terwujudnya pendidikan yang setara bagi perempuan, sebagaimana yang diperoleh oleh laki-laki. Langkah awal tercapainya tujuan ini terlihat pada tahun 1928 melalui Kongres Perempuan I, yang mendorong pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.

Sebuah tonggak penting dalam perjuangan untuk kesetaraan pendidikan terjadi di Jakarta, khususnya di jalan Rijnswijk 18, dengan pendirian sebuah lembaga pendidikan perempuan. Lembaga ini menjadi pusat penting bagi perkembangan kaum perempuan, yang berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang pada masa itu. Sorotan dari media massa, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Asia Raya pada tanggal 13 dan 14 Januari 2003, menunjukkan pentingnya peran lembaga tersebut dalam mengangkat derajat perempuan dalam bidang pendidikan. Dalam satu laporan lain dari Asia Raya disampaikan pidato oleh Kolonel Nakayama, seorang pejabat militer Jepang, yang menegaskan perlunya semangat baru dalam pendidikan, terutama bagi anak-anak, dan pentingnya peran guru-guru yang terlatih. Sebagai respons langsung terhadap pidato tersebut, pemerintah bersinergi dengan lembaga pendidikan perempuan tersebut untuk menyelenggarakan Kursus Latihan Guru. Kursus ini diikuti oleh peserta perempuan yang telah memiliki pendidikan yang memadai sebelumnya, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka memberikan pendidikan kepada kaum perempuan muda lain yang belum mendapat kesempatan pendidikan yang memadai..

Kegiatan wanita pada badan resmi Jepang

Pada masa pendudukan Jepang wanita sedikit sekali mendapatkan kesempatan dalam berbagai hal, sebab setiap gerak geriknya selalu dipantau dan diawasi dengan ketat dari kempetai (unit militer = polisi militer) Jepang. Kehadiran Jepang dengan segala kebijakan-kebijakannya dirasakan adanya perubahan yang keras yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang terhadap bangsa Indonesia, terutama untuk perempuan. Kaum wanita Indonesia juga turut menolak keras untuk ajakan-ajakan Jepang untuk bekerja sama. Namun, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang terkenal akan semboyan 3 A-nya, juga berdiri organisasi atau perkumpulan perempuan Indonesia, seperti; gerakan istri 3 A (gerakan itu dilengkapi dengan bagian puteri yang dinamakan Barisan Putri Asia Raya) (Manus, 1985), disamping itu pemerintah Jepang juga mendirikan *Fujinkai* (organisasi wanita) yang

kedudukannya khusus menampung segala bentuk kegiatan wanita. Sifatnya hirarkis karena yang diangkat sebagai ketua atau pimpinan adalah istri pejabat setempat. Tugasnya adalah membantu garis depan dan memperkuat garis belakang. Bantuan untuk garis depan antara lain latihan PPPK atau kepalang merah dan dapur umum. Sedang kegiatan di garis belakang seperti menambah persediaan bahan pangan dan pakaian. Namun, latihan kemiliteran diberikan juga kepada para gadis yang tergabung dalam Barisan Srikandi.

Ada satu hal juga yang harus kita ingat, yang namanya penjajah tentu melakukan eksploitasi dan bertingkah sesukanya. Begitu juga dengan nasib para perempuan Indonesia yang juga turut di eksploitasi pada masa pendudukan Jepang. Eksploitasi tersebut berupa para perempuan dijadikan budak seksual (*comfort women*) singkatnya sebagai wanita penghibur. Setiap perempuan digolongkan berdasarkan kecantikan mereka dan dipaksa melayani para tentara Jepang. Perempuan itu disebut *Karayukisan* yang diambil secara paksa dari keluarga mereka (Pangastoeti, 2009)

Itu dalam bidang sosial dalam bidang pendidikan perempuan Indonesia juga memiliki ruang untuk ikut merasakan pendidikan yang dirasakan oleh laki-laki. Artinya pada masa pendudukan Jepang semua anak diberikan kesempatan untuk belajar. Namun, fokusnya pendidikan saat itu untuk menunjang kebutuhan perang Jepang dan penekanan kepada pendidikan praktis daripada akademis. Meskipun literatur tentang pendidikan perempuan pada masa pendudukan Jepang masih terbatas, beberapa sumber menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak lagi dipisahkan berdasarkan kelas sosial, golongan dan gender seperti pada kolonial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki pada masa itu digabung dan tidak dipisahkan. Bahkan anak-anak miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi bisa merasakan pendidikan yang sama dengan anak-anak bangsawan dan keturunan Belanda.

Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba

Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba menjadi titik fokus dalam pembicaraan tentang pendidikan, khususnya di Jakarta pada masa pemerintahan militer Jepang. Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba atau yang sering disebut sekolah Wakaba ini didirikan oleh pemerintah militer Jepang sebagai tempat khusus bagi pelajar puteri. Sekolah Wakaba ini berlokasi di Jakarta yang bertujuan untuk membentuk para wanita menjadi ibu rumah tangga yang baik, sejalan dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah Jepang. Menariknya Sekolah Wakaba ini ialah sekolah yang bersifat “menampung”. Artinya, sekolah ini menjadi tempat penampungan bagi para pelajar puteri karena ketiadaan alternatif lain. Hal ini terungkap dari pernyataan bahwa para pelajar puteri, yang sebelumnya berasal dari sekolah Hindia-Belanda seperti MULO, AMS, dan HBS, akhirnya masuk ke Wakaba karena institusi pendidikan Hindia-Belanda telah ditutup oleh Jepang.

Keputusan masuknya para pelajar puteri ke Wakaba sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah militer Jepang yang membatasi akses ke sekolah-sekolah sebelumnya. Dengan demikian, Wakaba tidak hanya berfungsi sebagai sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Jepang untuk menghilangkan pengaruh Belanda di Jawa. Masuknya mereka ke dalam sekolah Wakaba, sebenarnya dipengaruhi dari kebijakan pemerintah militer Jepang

yang membekukan sekolah-sekolah dirian Hindia-Belanda. Para pelajar puteri bekas sekolah Hindia-Belanda (MULO, AMS. HBS), tidak bisa melanjutkan sekolahnya, karena institusi pendidikan Hindia-Belanda telah ditutup oleh Jepang. Karena tidak ada alternatif sekolah lain, akhirnya mereka ditampung ke dalam sekolah Wakaba. Dengan demikian, leksia "Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba", sesungguhnya terlibat dalam korelasi secara konotatif dengan upaya pemerintah militer Jepang untuk menghapus anasir- anasir Belanda di Jawa.

Masuknya para pelajar puteri ke Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba juga mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah militer Jepang mempengaruhi jalannya pendidikan di wilayah tersebut. Dengan menutup sekolah-sekolah Hindia-Belanda, pemerintah Jepang secara efektif mengubah lanskap pendidikan di Jakarta dan sekitarnya. Para pelajar puteri yang sebelumnya memiliki akses ke berbagai institusi pendidikan, terpaksa berkompromi dengan kehadiran Sekolah Wakaba sebagai satu-satunya opsi yang tersedia.

Dalam konteks ini, Sekolah Wakaba tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi simbol dari perubahan sosial dan politik yang terjadi di masa pendudukan Jepang. Keputusan untuk menampung para pelajar puteri dari berbagai latar belakang pendidikan juga menyoroti ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat pada masa tersebut. Dengan demikian, Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba menjadi lebih dari sekadar institusi pendidikan, melainkan juga cerminan dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik dan pendidikan, serta perubahan sosial yang terjadi di bawah pemerintahan militer Jepang di Indonesia.

Kesimpulan

Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan yang lebih terstruktur, seperti Sekolah Rakyat sebagai tingkat dasar pendidikan, yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat dan berlangsung selama enam tahun. Meskipun pendidikan yang diberikan oleh pendudukan Jepang memiliki tujuan utama untuk mendukung perang di Asia Timur Raya dan mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk berkontribusi dalam perang, pendudukan tersebut juga membawa beberapa keuntungan bagi bidang pendidikan. Misalnya, perkembangan bahasa Indonesia yang semakin luas. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tentu berbeda dengan masa kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Demi menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang pada mulanya memberlakukan sistem pendidikan yang cukup baik. Akses pendidikan sedikit lebih mudah untuk didapatkan, tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam pendidikan untuk kaum pria maupun perempuan. Pendidikan bagi perempuan pada masa pendudukan Jepang juga mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun pada awalnya terdapat harapan besar terhadap pemerintah Jepang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan kesetaraan gender yang lebih besar, namun realitanya, pendidikan perempuan masih diarahkan untuk mendukung agenda perang Jepang.

Akan tetapi pada masa pemerintahan Jepang, Jepang mendirikan sekolah wakaba ini didirikan oleh pemerintah militer Jepang sebagai tempat khusus bagi pelajar puteri. Sekolah

Wakaba ini berlokasi di Jakarta yang bertujuan untuk membentuk para wanita menjadi ibu rumah tangga yang baik, sejalan dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah Jepang. Menariknya Sekolah Wakaba ini adalah sekolah yang bersifat “menampung”. Artinya, sekolah ini menjadi tempat penampungan bagi para pelajar puteri karena ketiadaan alternatif lain. Masuknya para pelajar puteri ke Sekolah Kepandaian Puteri Wakaba juga mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah militer Jepang mempengaruhi jalannya pendidikan di wilayah tersebut. Dengan menutup sekolah-sekolah Hindia-Belanda, pemerintah Jepang secara efektif mengubah lanskap pendidikan di Jakarta dan sekitarnya. Para pelajar puteri yang sebelumnya memiliki akses ke berbagai institusi pendidikan, terpaksa berkompromi dengan kehadiran Sekolah Wakaba sebagai satu-satunya opsi yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Furoidah, A. (2019). Tokoh Pendidikan Islam Perempuan Rahmah El-Yunusiah. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 20-28.
- Hudaidah & Karwana. (2021). Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1 (2), 97-104.
- Kosasih, Achmad. (2019). Perjuangan Politik Perempuan di Masa Pendudukan Jepang. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah* 2 (2).
- Mardalis (1999) dalam Hartanto et al. (2020). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Edisi Ke-4.
- Pangastoeti, S. (2009). "Dari Kyuushuu ke Ran'in: Karayuki-san dan Prostitusi Jepang di Indonesia (1885-1920)." *Humaniora*, 21 (2).
- Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8(1), 10-23.
- Rosalini & Prianti. (2022). Propaganda Jepang di Indonesia ELALUI Majalah Djawa Baroe pada Masa Kependudukan 1943. *Jurnal Komunikasi*, 16 (2), 223-238.
- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Historia: Jurnal Pembelajaran Sejarah dan Sejarah UM Metro*, 5 (2), 207-217.
- Urfan, N.F. (2022). Pemuda pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa : Semiotika Sampul Depan Djawa Baroe 1943-1945. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, 5 (1), 27-44.
- Zuriatin, Z. (2022). Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *Pendidikas: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(01), 24-30.